

PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN ATAS PAILITNYA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Nur Hidayah¹
Ramli Siregar²
Windha³

ABSTRACT

Foundation is a legal entity generally in education, health, the field of religion, culture, social areas, and humanitarian who has no members. Foundation runs its activities through organ foundation, namely builder, administrators, and supervisors. Organ foundation in managing foundations can lead to a foundation for bankruptcy is not always caused by negligence organ foundation in managing the foundation.

The issue in this skripsi is how legal regulation on the management of the foundation according to law number 16 year 2001 Jo. Law number 28 year 2004 on the foundation, how bankruptcy foundation, as well as how accountability organ foundation bankruptcy foundations.

The research method used type of normative legal research. Source of data used are secondary data, which consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Data was collected by the engineering literature study and analysis of data using qualitative and inductive approach deduktif.

Setting the foundation by law include the establishment of the foundation that requires the establishment of foundations in the notarial deed, also be set on a foundation consisting of organ builder, administrators, and supervisors. A foundation can suffer due to bankruptcy because the foundation has two or more creditors and not pay in full at least one debt that has matured and can be billed, declared bankruptcy by court. Organ responsible for bankruptcy foundation is provided for in law foundation that is if bankruptcy occurred because of errors or omissions in the wealth management and supervisory foundation is not enough to cover the losses caused by bankruptcy.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Organ, Yayasan, Kepailitan

¹ Penulis

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Yaysan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah trobosan baru bagi yayasan yang beroperasi di Indonesia. Undang-Undang ini setidaknya-tidaknya telah menjadi payung hukum bagi masyarakat yang berkecimpung dan berurusan dengan yayasan seperti pendiri, pembina, pengawas serta anggota masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2004 Undang-Undang Yayasan ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004.

Peraturan perundang-undangan terkait Yayasan yang telah diundangkan Pemerintah, telah memaksa pihak-pihak terkait mengubah cara pandang tentang badan hukum Yayasan. Pemahaman yang tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berpotensi menimbulkan resiko hukum bagi para pelakunya. Risiko dapat bersifat material, finansial, maupun immaterial, seperti resiko hukum. Risiko material dapat dinilai atau dapat diukur. Sedangkan resiko immaterial seperti resiko hukum sering tidak terukur, tidak terbatas dan kadang tak terduga-duga. Dalam berbagai aktivitas, resiko hukum masih sering luput dari perhatian. Padahal kita tahu bahwa resiko hukum sering tidak teratur dan tidak terbatas jenis, sasaran, waktu, dan/atau besarannya. Hal demikian dapat terjadi mungkin akibat pengetahuan kita mengenai masalah hukum dan

risiko hukum yang kurang atau mungkin karena pandangan, penyikapan, kesadaran, kepatuhan hukum dan/atau tindakan kita yang keliru terhadap aspek hukum dan/atau resiko hukum yaitu menganggap bahwa aspek atau masalah hukum dan resiko hukum bisa diatur. Hal ini bisa terjadi karena penegakan hukum di negara kita yang memang masih sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan yayasan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, dan bagaimana kepailitan dalam yayasan, serta bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan atas pailitnya yayasan.

METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁴ Definisi tersebut menunjukkan bahwa karakter dasar yayasan

adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Hal ini yang membedakan antara yayasan dan perkumpulan. Dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk kegiatan sosial) maka karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial. Dalam Undang-undang yayasan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan mengenai bagaimana yayasan itu dapat memperoleh suatu badan hukum, yaitu : Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

Sebelum berlakunya UU Yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung. Lebih parah lagi, karena tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa yayasan konkordansi mengikuti hukum Belanda, apalagi di Belanda sendiri pengaturan yaaysan sudah mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka.

Sebelum membahas mengenai cara mendirikan yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, maka terlebih dahulu dijelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Ada beberapa syarat agar perkumpulan atau badan/badan usaha disebut sebagai badan hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum,

⁴ Republik Indonesia , Undang-Undang No. 16 tentang Yayasan, Pasal 1.

khususnya dalam kaitan dengan sumber hukum yang formal. Tentang syarat badan hukum yang dikaji dari sumber hukum formal memberikan beberapa kemungkinan, bahwa badan hukum tersebut telah memenuhi:⁵

Dalam keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000 dijelaskan bahwa, pokok pikiran, yaitu: pertama, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai peraturan tentang Yayasan. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, Yayasan sekarang ini tumbuh bagaikan cendawan dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Namun pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan. Kedua, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan. Ketiga, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan terhadap materi hukum sebagai

salah satu aspek pembangunan hukum diarahkan pada pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiriannya
3. Harus dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia, melainkan adalah badan hukum. Yayasan kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, serta tidak mempunyai *central bewustzijn*, karenanya yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.⁶ Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, Yayasan

⁵ Chaidir Ali, *Op., cit.*, hlm. 79-98.

⁶ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17.

sekali pun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri.

Sebelum diundangkannya UU Yayasan di Indonesia, dalam praktiknya yayasan tidak mempunyai anggota, melainkan hanya pengurus. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata belum ada keseragaman dalam kepengurusan yayasan. Berbagai macam istilah untuk penyebutan pengurus. Selain pengurus, ada pula yang menyebutkan dengan dewan pengurus, atau badan pengurus. Di dalam organ pengurus, dijumpai pula pengurus harian, dewan pendiri, dewan penyalut, dewan pelindung, dewan kehormatan, dewan penasihat, dan sebagainya, bahkan ada yang sangat keliru dengan menyebutkan anggota. Keseragaman yang dimiliki oleh yayasan adalah struktur pengurusnya terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara.

Namun dalam UU Yayasan, secara limitatif disebutkan, bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ ini masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang terpisah. Dengan demikian UU Yayasan yang baru tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan organ.

Sumber kelemahan utama dari pengelolaan yayasan adalah tidak adanya aturan yang mengatur tentang yayasan. Yayasan dapat dikelola secara bebas tanpa ada peraturan yang harus diperhatikan. Keberadaan yayasan selama ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang terpelihara. Kekuatan hukum dari praktek-praktek ini tentunya sangat lemah. Akibat lain adalah tidak terjaminnya kepastian hukum mengingat praktek yang satu berbeda dengan praktek lainnya. Ketiadaan pengaturan yayasan juga berarti tidak

adanya acuan yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu boleh atau tidak boleh.

Kelemahan lain adalah yayasan dikelola secara tidak profesional. Pendiri yayasan adalah juga pengurus. Peran dari pengawas yang diangkat untuk mengawasi kegiatan dan keuangan yayasan tidak melaksanakan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, bahkan terkesan pengangkatan mereka dilakukan sebagai formalitas belaka.⁷

B. KEPAILITAN DALAM YAYASAAN

Pasal 1 *Faillissementsverordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan, bahwa debitur harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan *judgment* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya.

Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal

⁷ Bappenas, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8582/ diakses tanggal 20 Januari 2013

ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁸

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut telah dipenuhi yaitu:

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih krediturnya.
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan secara tegas menentukan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Apabila di perhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan namun diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Menurut undang-undang kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pernyataan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang dimaksud pengadilan menurut UUK adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum. Bila debitur telah meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan

yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Pasal 3 UUK disebutkan, dalam hal debitur berupa persero suatu firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. sedangkan dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah RI, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Putusan pernyataan pailit yayasan membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dari ketentuan Pasal 21 diatas diketahui bahwa kepailitan yayasan yang merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan. Pembentuk Undang-undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat konservatoir yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.

Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 KHUPerdata. Perlu ditekankan bahwa tujuan

⁸ Hukum Kepailitan,
www.hukumkepailitan.com/2012/01/04/pengertian-dan-syarat-kepailitan/ di akses tanggal 23 Januari 2013

kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh kekayaan debitor oleh *curator* kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dengan terjadinya kepailitannya yayasan berlakulah "*general statutory attachment*" atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor. Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.⁹

Harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Harta tersebut pengurusannya beralih ke tangan kurator. Namun, tidak semua harta kekayaan debitor dalam disita dalam kepailitan. Pasal 22 UUK menyebutkan, ada tiga jenis kekayaan debitor yang tidak termasuk ke dalam harta pailit, yaitu :

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

3. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

C. PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN ATAS PAILITNYA YAYASAN

Banyaknya bentuk tanggung jawab menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. dalam keluarga perlu ditanamkan rasa atau sifat tanggung jawab dengan memberikan tugas-tugas kecil kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai orang tua tentunya kita pun berkeinginan untuk menanamkan rasa tanggung jawab. yang teguh bahwa anak harus setia melakukan tugas-tugas kecil itu, memang menimbulkan ketaatan. Namun demikian bersamaan dengan itu bisa juga timbul suatu pengaruh yang tidak kita inginkan bagi pembentukan watak anak, karena pada dasarnya rasa tanggung jawab bukanlah hal yang dapat diletakkan pada seseorang dari luar, rasa tanggung jawab tumbuh dari dalam, mendapatkan pengarahan dan pemupukan dari sistem nilai yang kita dapati dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Rasa tanggung jawab yang tidak

⁹ MR.J.B.Huizink, *Op.,Cit.*, hal 1.

bertumpuk pada nilai-nilai positif, adakalanya dapat berubah menjadi sesuatu yang asosial.¹⁰

Seperti halnya Yayasan yang mempunyai organ yang terdiri atas *Pembina*, *Pengurus*, dan *Pengawas*. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh *Pengurus*. *Pengurus* wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada *Pembina* mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. *Pengawas* bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada *Pengurus* dalam menjalankan kegiatan yayasan. *Pengurus* dan *pengawas* yayasan dituntut untuk melibatkan kecapakan/keahlian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Prinsip tersebut sudah diatur dalam UU Yayasan. Hal ini merupakan sebuah bentuk upaya antisipatoris yayasan sekiranya *pengurus* dan *pengawas* melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam pasal 39 dan pasal 47 UU yayasan di jelaskan bahwa: Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian *Pengurus* dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota *Pengurus* secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota *Pengurus* yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Anggota *Pengurus* yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara

berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi *Pengurus* Yayasan manapun.

Dalam Pasal 47 menegaskan bahwa: Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian *Pengawas* dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota *Pengawas* secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota *Pengawas* Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota *Pengawas* yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi *Pengawas* Yayasan manapun.

Orang yang duduk dalam organ, dapat bertindak sebagai kualitas organ dan dapat juga bertindak secara pribadi. Apabila organ melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai organ, maka yayasan dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organ tersebut. Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan oleh organ dalam kualitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya harus ditanggung oleh pribadi sendiri, dan badan hukum sama sekali tidak terikat. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap, yang tidak dikemukakan di dalam undang-undang.

¹⁰ Romario,
romario.blogspot.com/2011/12/manusia-tanggung-jawab.html diakses tanggal 25 Januari 2013

Yayasan yang dikelola dan dijalankan oleh pengurus. Berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya berbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan diatur tentang syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta penentuan kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Oleh karena itu, segala aspek dan kegiatannya didomisili oleh rapat anggota, sedangkan yayasan dominasi ada pada pengurus. Dengan demikian, pengurus merupakan pusat dari segala aspek dalam kegiatan yayasan. Dengan demikian organ yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai tujuan pendiriannya.

Perbuatan dari pengurus Organ yang oleh hukum dipertanggung-jawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus mewakili badan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1655 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa pengurus dapat mengikatkan badan hukum dengan pihak ketiga. Anggaran dasar dan/atau undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya merupakan ketentuan yang memuat syarat konstitusif dari badan hukum yang menunjukan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum.

Di dalam Undang-Undang yayasan telah ditetapkan, bahwa yang mewakili kepentingan yayasan adalah pengurus,¹¹ hanya saja sistem pertanggungjawaban yang ada di dalam Undang-Undang yayasan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban badan hukum perdata

lainnya, seperti Undang-Undang perseroan terbatas.

Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ dan yayasan, ada pula yang dilakukan secara renteng antar organ, dan ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara perorangan.

Pertanggungjawaban secara renteng antar organ dapat dilihat dalam beberapa pasal. Pasal 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawabn secara renteng atas seluruh kerugian yayasan. Demikian pula dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.¹²

Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antara organ dengan yayasan itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa pasal. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab.¹³

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 31 Ayat (1)

¹² *Ibid.*, Pasal 51

¹³ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (1) dan (2)

Di dalam Undang-Undang yayasan ada beberapa larangan yang ditetapkan bagi pengurus. Bagi organ yayasan dilarang merangkap jabatan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas, dan demikian pula sebaliknya. Setiap anggota tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus Yayasan yang bersangkutan, atau anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Ada kemungkinan di samping badan hukum, organ yang duduk di dalamnya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban badan hukum ada, jika organ berindak sedemikian dalam batas-batas suasana formal dari wewenangnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula. Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggungjawaban badan hukum, organ secara pribadi mungkin saja harus bertanggungjawab sendiri atas perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pengurus merupakan landasan kegiatan para pengurus pada tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan bertindak pengurus serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu badan hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga, maka disini pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hubungan ini

ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama yayasn. Sedangkan pada sisi lain, kewenangan pengurus mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pertanggungjawaban organ terhadap pailitnya yayasan adalah Dalam hal yayasan menjadi debitor karena yayasan mempunyai utang, tidak menutup kemungkinan yayasan ini untuk dipailitkan. Persoalannya, bagaimana tanggung jawab organ yayasan dan yayasan itu sendiri jika yayasan pailit. Pada prinsipnya tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab pada yayasan dalam keadaan normal, Pertanggungjawaban organ terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan.

Banyak sebab mengapa berbagai yayasan di Indonesia menyimpang dari tujuan filosofis dari didirikannya yayasan. Pertama, sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Namun dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal. Di Amerika Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai tetapi juga calon mahasiswa yang berasal dari kalangan berada. Demikian pula dengan pendirian rumah

sakit: apakah dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial? Praktek menunjukkan bahwa ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka-mereka yang menginginkan pelayanan prima, tidak berdesak-desakan dan berada di rumah sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh karenanya sulit untuk menentukan secara sederhana apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.

Sebagai badan hukum yayasan tentunya dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat melakukan perbuatan hukum melalui perngurusnya. Perbuatan hukum yang dilakukan dapat berupa transaksi jual beli, pinjam-meminjam., sewa-menyewa dan banyak lagi aktivitas lainnya. Akibat yang timbul dari aktivitas tersebut, bahwa yayasan dapat mempunyai utang atau piutang, dengan kata lain dapat menjadi debitur atau kreditor. Persoalannya, bagaimana tanggung jawab organ yayasan dan yayasan itu sendiri jika yayasan pailit. Pada prinsipnya tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab pada yayasan dalam keadaan normal, seperti halnya dengan tanggung jawab seorang direksi pada perseroan terbatas.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melihat uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan antara lain adalah yayasan sebagai badan hukum pada umumnya bergerak

dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, bidang sosial, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

2. Kepailitan yayasan disebabkan dari terpenuhinya persyaratan Pailitnya Yayasan disebabkan karena yayasan tersebut tidak dapat membayar lunas hutang kepada yang telah dipinjamkannya. Oleh sebab itu yayasan dinyatakan pailit dan yayasan tersebut haruslah dalam keadaan yayasan tersebut berutang dan tidak sanggup membayar dalam hal bagaimana pun sehingga yayasan tersebut dapat dinyatakan pailit.
3. Pertanggungjawaban pengurus merupakan landasan kegiatan para pengurus pada tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan bertindak pengurus serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu badan hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga, maka disini pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hubungan ini ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama yayasan.

B. SARAN

Berdasarkan paparan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hendaknya diamandemen untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas dan tegas terkait perumusan pengertian

- tujuan sosial dan kemanusiaan juga tentang dengan tanggung jawab dalam pengelolaan yayasan.
2. Perlunya adanya ketentuan lain yang mengatur mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
3. Hendaknya peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan suatu kondisi yang kondusif dalam hal kepengurusan yayasan harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1991
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Asser, C. *Handleiding tot de Beoefening van Het Nederlands Burgerlijk Recht*. Uitgeversmaatschappij, W.E.J.Tjeenk Willink-Zwolle, 1968.
- Bruggink, J.J.H. Alih bahasa Arief Sidarta. *Refleksi Tantang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chatamarrasjid, Ais. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chatamarrasyid, Ais. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya, 2000.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Website

- Pengurus Yayasan. <http://www.wikipedia.com>. (diakses tanggal 30 Januari 2013).
- Wirawan, Helex. Tanggung Jawab Hukum Bagi Organ Yayasan, <http://www.baginantheworld.com>. (diakses tanggal 22 Juli 2013).